

TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI FORMULA E JAKARTA

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Dipanggil KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil salah satu anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta.

Anggota Fraksi PDI-P yang dipanggil KPK yakni Syahril. Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Gembong Warsono.

"Iya (dipanggil), sebetulnya jadinya sudah lama, berbarengan dengan Pak Pras dan lainnya," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Rabu (9/3).

Gembong mengatakan, pemanggilan Syahril ditunda karena terpapar Covid-19. "Maka ditunda, baru diadwalkan sekarang," ucap Gembong.

Gembong berujar, Syahril dipanggil karena pernah menjabat sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta yang membahas anggaran milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Uang commitment fee penyelenggaraan Formula E diketahui dibayar menggunakan anggaran Dispora DKI.

Gembong mengatakan, dengan pemanggilan Syahril, ada dua anggota fraksinya yang sudah memberikan keterangan KPK. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, yang berasal dari Fraksi PDI-P, diperiksa pada 8 Februari 2022. Selain anggota Fraksi PDI-P, KPK juga sempat meminta keterangan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Anggara Wicitra yang merupakan anggota Fraksi PSI. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PENUMPANG KRL MULAI DIPERKENANKAN DUDUK TANPA JARAK

Penumpang KRL Comuterline duduk tanpa jarak dalam KRL Jabodetabek di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (9/3). Kereta komuter di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo diperkenankan melayani pengguna hingga 60 persen dari kapasitas dan boleh duduk tanpa jarak dengan tetap menerapkan prokes.

DKI Pinjam Dana PEN Rp1 Triliun untuk Program 942 Project Penanganan Banjir

Pinjaman dana PEN dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini bersifat multiyears pada 2021-2022. PT SMI telah mengucurkan uang muka sebesar 15 persen yang dipakai pemerintah DKI untuk membangun sembilan rumah pompa atau polder.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan program 942 Project untuk penanganan banjir Jakarta menelan anggaran sekitar Rp1 triliun. Pemerintah DKI menggunakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 untuk merealisasikan program pencegahan banjir itu.

"Sudah lelang, harusnya sudah berjalan ya," kata Ida saat dihubungi, kemarin. Menurut Ida, pinjaman dana PEN dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini

bersifat multiyears pada 2021-2022. PT SMI telah mengucurkan uang muka sebesar 15 persen yang dipakai pemerintah DKI untuk membangun sembilan rumah pompa atau polder.

PT SMI mentransfer lagi dana untuk pembebasan lahan yang harus dieksekusi hingga Maret ini.

"Lalu PT SMI memberikan sisa anggaran selain pembebasan lahan sampai Juni," kata Ketua Komisi Bidang Pembangunan itu.

Politikus PDIP ini mengatakan DPRD DKI telah menyetujui pinjaman tersebut setelah mendengarkan penjelasan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI dalam rapat

kerja Komisi D. Waktu itu, Dinas SDA menyampaikan perlu pembangunan waduk dan polder agar air bisa dibuang ke laut.

Dinas SDA DKI membuat program 942 Project untuk menanggulangi banjir di Ibu Kota. Program itu dibesut untuk pembangunan dan perbaikan 9 polder, 4 waduk, serta 2 sungai. Program ini ditargetkan rampung seluruhnya pada Agustus 2022.

Berikut rincian program yang diberi nama 942 Project untuk penanganan banjir Jakarta:

- 9 Polder: Kelapa Gading, Marunda, Muara Angke, Teluk Gong, Mangga Dua, Pulomas, Adhyaksa, Green Garden, dan Kamal.
- 4 Waduk: Pondok Ronggon, Embung Wirajasa, Lebak Bulus, dan Brigif.
- 2 Sungai: Museum Bahari dan Pasar Baru. ● yan

Penumpang KRL Mulai Duduk Tanpa Jarak

JAKARTA (IM) - VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menyampaikan bahwa penumpang KRL dapat duduk tanpa berjarak mulai hari ini, Rabu (9/3). "Peningkatan kapasitas ini juga ditandai dengan pengguna kini dapat duduk tanpa berjarak.

Petugas KAI Commuter telah mencabut dan memberikan tempat duduk di KRL dari marka jaga jarak yang sebelumnya ada," kata Anne dalam keterangan yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Anne mengatakan KAI Commuter saat ini menjalankan operasi dan layanan KRL sesuai aturan terbaru dari pemerintah yaitu Surat Edaran Kemenhub Nomor 25 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, kereta komuter di wilayah aglomerasi termasuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo diperkenankan melayani pengguna hingga 60 persen dari kapasitas.

Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan peningkatan setelah sebelumnya hanya melayani 45 persen dari kapasitas. "Dengan dihapusnya marka pada tempat duduk, KAI Commuter mengajak pengguna untuk lebih disiplin mengikuti marka berdiri. Marka berdiri tetap berlaku sejalan dengan pembatasan

kapasitas yang diatur dalam SE Kemenhub," katanya.

Ia melanjutkan untuk anak usia di bawah lima tahun (balita) yang sebelumnya tidak diizinkan menggunakan KRL, kini sudah dapat kembali naik KRL dengan syarat didampingi orang tua dan mengikuti protokol kesehatan secara ketat serta menggunakan KRL di luar jam-jam sibuk.

KAI Commuter mengimbau pengguna untuk tetap mengutamakan kesehatan anak terutama yang belum divaksin dan menghindari mobilitas kecuai untuk urusan penting maupun mendesak.

Anne menegaskan meski terdapat aturan perjalanan yang lebih fleksibel, sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang membaik, pengguna KRL tetap perlu mengikuti aturan dan protokol kesehatan.

"Pengguna juga wajib sudah divaksin dengan melakukan scan melalui aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin secara fisik," ujarnya.

Ia menambahkan operasional KRL tetap berjalan pada waktu pukul 04:00 - 22:00 WIB dengan 1.005 perjalanan per harinya. Sementara untuk KRL Yogyakarta-Solo juga tetap beroperasi dengan 20 perjalanan KRL per hari. ● yan



FOTO: ANT

KERAJINAN DARI KALENG BEKAS

Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan lukis di atas media kaleng bekas di Kaleng Lani, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/3). Lukisan di kaleng bekas tersebut selain dijual dengan harga Rp50 ribu hingga Rp250 ribu per buah juga sebagai kampanye kelestarian alam dengan mendaur ulang sampah kaleng menjadi benda yang bermanfaat.

Puluhan Bangunan di Atas Trotoar Cakung Dibongkar Petugas

JAKARTA (IM) - Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satpol PP menertibkan puluhan bangunan semi permanen yang didirikan di atas trotoar di Cakung, Jakarta Timur.

Menurut Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan, penertiban bangunan yang selama ini digunakan untuk berjualan itu dilakukan guna mengembalikan fungsi trotoar.

"Kita mau masyarakat yang berdagang di wilayah trotoar itu kita minta kembalinya. Hari ini Alhamdulillah kita lakukan bersama-sama pihak TNI, Polri, Satpol PP, Sudin Bina Marga, Sudin SDA melakukan pengembalian fungsi itu," kata Eka Darmawan di Jakarta Timur (Jaktim), Rabu (9/3).

Eka menambahkan, penertiban itu dilakukan dengan mengerahkan satu alat berat untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas trotoar.

"Karena memang fungsi jalan masuk ini harus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Jadi fungsi jalan ini tidak terganggu," ujar Eka.

Dia mengatakan, pihaknya telah memberikan sosialisasi selama satu pekan kepada warga untuk melakukan pembongkaran sendiri.

"Beberapa warga sudah ada yang membongkar sendiri. Jadi memang sebenarnya cukup kooperatif," tutur Eka.

Dia berharap pengembalian fungsi trotoar itu dapat bermanfaat bagi warga dan juga lingkungan.

"Semoga pengembalian fungsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat," katanya. ● yan

Muara Bahari akan Dijadikan Kampung Bebas Narkoba

JAKARTA (IM) - Peredaran narkotika di wilayah Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, masih marak. Hal itu tecermin dari sejumlah barang bukti dan tersangka yang didapatkan petugas kepolisian saat penggerebekan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan menyebut wilayah Kampung Muara Bahari akan dijadikan sebagai Kampung Tangguh Bebas Narkoba.

"Akan dijadikan Kampung Tangguh Bebas Narkotika. Jadi gak ada (peredaran) narkotika lagi di sini," tegas Zulpan di lokasi, Rabu (9/3).

Seperti diketahui, polisi membongkar kelompok bandar narkotika di Kampung Muara Bahari, Jakarta Utara, pada Rabu (9/3). Para pelaku

menggunakan kode tertentu, agar aksinya tidak tercium oleh kepolisian. Kode yang dipakai bandar narkotika menggunakan petasan.

"Mereka nyalakan petasan apabila ada gangguan dari petugas. Lalu, mereka akan tiarap," ungkap Zulpan.

Tak hanya petasan, para bandar juga telah menyiapkan kamera pengawas (CCTV) untuk memantau pergerakan, jika ada polisi yang datang. Sebanyak 700 personel gabungan diterjunkan dalam penggerebekan tersebut. Petugas gabungan juga menangkap 26 orang, yang terdiri dari 18 pria dan 8 perempuan. Setelah diperiksa, seluruh pelaku akan ditetap sebagai tersangka.

"26 orang pelaku diamankan," tukasnya. ● yan

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Soal Banjir

JAKARTA (IM) - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menggabulkan sebagian gugatan tujuh warga korban banjir. Kepala Biro Hukum DKI, Yayan Yuhana pun angkat bicara alasan di balik proses banding tersebut. Menurutnya, banding diajukan karena dalam beberapa hal, pertimbangan majelis hakim PTUN disebutnya kurang cermat.

"Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan majelis hakim PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingga perlu direvisi dalam proses banding," kata Yayan saat dikonfirmasi, Rabu (9/3).

Lebih lanjut, dalam beberapa dokumen yang sudah disampaikan Pemprov DKI Jakarta bahwa pengerukan di beberapa kali di beberapa lokasi sudah selesai dilakukan. Kemudian, terdapat pula program penanganan banjir lainnya yang dilaksanakan namun

belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim PTUN.

Untuk informasi, dalam amar putusannya, PTUN DKI Jakarta mewajibkan Gubernur DKI Jakarta melakukan pengerukan Kali Mampang agar tuntas sampai ke Pondok Jaya dan penutupan Kali Mampang di Kelurahan Pela Mampang.

Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir Francine Widjojo pun menyayangkan keputusan Anies untuk mengajukan banding putusan PTUN ini.

"Kami menyayangkan upaya banding Gubernur DKI Jakarta yang seakan tak mau menerima kenyataan bahwa pengendalian banjirnya belum serius. Pak Anies tak berempati pada warga-warganya yang trauma menjadi korban banjir DKI Jakarta," kata Tim Advokasi Solidaritas untuk Korban Banjir, Francine Widjojo dalam keterangannya, Rabu (9/3).

Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut dilakukan oleh warga karena Gubernur DKI Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya mengendalikan banjir melalui normalisasi sungai berdasarkan RPJMN, RPJMD DKI Jakarta, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2030.

Khususnya pada Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang Akibatnya para pengugat mengalami banjir terbesar dan terparah tanggal 19-21 Februari 2021 dengan ketinggian banjir mencapai sekitar 2 meter.

"Pak Anies seolah lupa bahwa pengendalian banjir adalah kerja rutin Gubernur DKI Jakarta yang tidak perlu diingatkan, apalagi digugat oleh warganya dengan menempuh prosedur panjang," ucapnya.

"Kini warga diseret lebih dalam lagi ke dalam proses pengadilan, padahal fakta sudah jelas dan terang benderang. Warga hanya ingin Gubernur dan jajarannya serius menanggulangi banjir," pungkasnya. ● yan

Pemkab Bekasi Komitmen Tingkatkan Capaian MCP Tahun 2022

FOTO: DOK.PIM PROKOPIM SETDAKAB BEKASI



BANDUNG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen meningkatkan penilaian capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Program Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pedoman MCP Tahun 2022 sekaligus Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah, didampingi Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA. Supratman. Acara berlangsung di Aula Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Bandung, Selasa (8/3).

"Tentunya kita akan targetkan di tahun 2022 ini, kita akan lakukan peningkatan yang signifikan. Komitmen dan konsistensi daripada kepala daerah sangat penting guna meningkatkan capaian MCP di Kabupaten Bekasi," ungkap Dedy dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (9/3).

perbaikan di 8 area intervensi program MCP.

"Kita berupaya untuk bisa lebih baik dari tahun lalu. Makanya kita minta kepada pimpinan perangkat daerah untuk lebih serius dan aktif. Mudah-mudahan capaian MCP di Kabupaten Bekasi dapat meningkat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman menjelaskan, berdasarkan laporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021, penggunaan aplikasi MCP Korsupgah di Kabupaten Bekasi masih harus ditingkatkan yaitu mencapai 63%.

Namun demikian, dalam rangka meningkatkan capaian MCP, Kabupaten Bekasi akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan dengan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait yang menjadi penanggung jawab setiap area intervensi dan membangun komitmen untuk bisa meningkatkan capaian MCP dari tahun 2022.

"Target kita bisa mencapai setara dengan Jawa Barat yakni

75%. Kita berharap kedepannya bisa lebih baik lagi, dan semoga Pemkab Bekasi capaian MCP tahun depan bisa meningkat," tandasnya.

Untuk diketahui, MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.

Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APUP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Adapun tujuan MCP adalah untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance serta peningkatan pelayanan publik. ● mdl

PENGUMUMAN
PENGALIHAN SELURUH SAHAM (AKUISISI) & PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS-LB) PT DANAU BUMI MANDIRI ("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini kami mengumumkan rencana Pengalihan atau seluruh saham milik Tuan EBY SURATMAN dan Tuan HENDRA SALIM.

Bagi pihak ketiga yang merasa keberatan dengan rencana pengalihan saham tersebut dapat mengajukan sanggahan atau keberatan kepada Perseroan, beralamat di Daan Mogot KM 12,8 Kav. 21 No. 6, Komplek Daan Mogot Prima Jakarta, Kel. Rawa Buaya, Kec. Grogol, Jakarta Barat.

PT DANAU BUMI MANDIRI
 Direksi